

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dimoderasi Oleh Kepatuhan Wajib Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

Hardiyati Supriyatna¹, Ati Retna Sari², Anwar Made³

^{1,2,3} Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: diahhardiyati13@gmail.com, atiretnasari@unikama.ac.id, anwarmade18@gmail.com

Article History

Received: May

Revised: June

Published: June

Key Words:

Regional Tax

Local Revenue (PAD)

Taxpayer Compliance

Abstract: This study aims to analyze the effect of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, and parking tax on Local Own-Source Revenue (PAD) in Malang Regency, with taxpayer compliance as a moderating variable. The growth of the tourism and culinary sectors is expected to contribute to regional tax revenues and increase PAD. This research employs a quantitative approach with an explanatory research design. The data used are secondary data obtained from the Regional Revenue Agency of Malang Regency for the period 2017 to 2021. Data analysis was conducted using the Partial Least Square (PLS) method with SmartPLS software. The results show that hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, and parking tax have a positive relationship with PAD. However, taxpayer compliance shows a negative relationship with PAD in the structural model of this study. On the other hand, taxpayer compliance acts as a moderating variable that tends to strengthen the relationship between regional taxes and PAD across each type of tax. Therefore, the effectiveness of increasing PAD is not only determined by the amount of regional tax revenue, but also influenced by taxpayer compliance levels as well as other external factors.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara terbesar ke-14 di dunia dikenal memiliki kekayaan alam yang luar biasa, sehingga memperoleh predikat sebagai salah satu dari 17 negara megadiversitas oleh Conservation International. Keanekaragaman flora, fauna, serta keindahan alam tersebut menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pengembangan destinasi wisata, diperlukan tiga elemen utama, yaitu daya tarik (attractiveness), fasilitas (amenities), dan aksesibilitas (accessibilities).

Pariwisata Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022, di mana dalam waktu 18 bulan Indonesia berhasil menempati peringkat ke-8 kawasan Asia Pasifik. Pemerintah juga mendorong investasi pada sektor pendukung pariwisata seperti pembangunan hotel, restoran, kafe, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Indonesia menawarkan berbagai jenis wisata, antara lain wisata budaya, bahari, cagar alam, konvensi, dan pertanian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia meningkat dari tahun 2017 hingga 2019, yaitu dari 14.039.799 menjadi 16.106.954 wisatawan. Namun, angka tersebut menurun drastis pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19, masing-masing menjadi 4.052.923 dan 1.557.530 wisatawan.

Sebagian besar wisatawan memilih berkunjung ke Provinsi Jawa Timur yang memiliki beragam destinasi unggulan seperti Kawah Ijen, Kawasan Wisata Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Alas Purwo, Kota Tua Surabaya, Air Terjun Tumpak Sewu, serta kawasan wisata pantai di Malang Selatan. Berkembangnya sektor pariwisata di Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan memperluas kesempatan kerja.



Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Selain wisata alam, Kabupaten Malang juga berpotensi menjadi pusat wisata halal dan destinasi kuliner. Pada tahun 2022 tercatat terdapat 35 hotel dengan tingkat okupansi rata-rata mencapai 80 persen. Kondisi tersebut menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi sektor jasa dan pariwisata yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu komponen utama PAD berasal dari pajak daerah, yang dalam konteks penelitian ini mencakup pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Pajak daerah tersebut merepresentasikan kontribusi dari berbagai aktivitas ekonomi di sektor pariwisata, kuliner, hiburan, serta mobilitas masyarakat yang berkembang di suatu wilayah. Optimalisasi pajak daerah menjadi indikator penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Jenis pajak daerah yang memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi di Kabupaten Malang antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Meningkatnya jumlah wisatawan dan aktivitas masyarakat berpotensi mendorong penerimaan dari sektor-sektor tersebut. Selain itu, pengembangan sektor kuliner melalui festival Bakso Malang dan dukungan terhadap UMKM juga menunjukkan adanya potensi peningkatan pajak restoran.

Di sisi lain, meningkatnya mobilitas kendaraan akibat pertumbuhan pariwisata dan ekonomi juga berdampak pada kebutuhan pengelolaan parkir. Menurut Global Traffic Scorecard 2021, Malang berada pada peringkat keempat wilayah dengan tingkat kemacetan tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan tingginya aktivitas kendaraan yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan potensi penerimaan pajak parkir.

Namun demikian, besarnya potensi pajak daerah tidak selalu diikuti dengan optimalnya realisasi penerimaan. Salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penerimaan pajak daerah adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar peluang pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan PAD.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

Metode Penelitian

Explanatory/confirmatory research atau pendekatan penelitian penjelasan merupakan jenis penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini, hal ini dikarenakan tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan hubungan klausal antara variabel berdasarkan hipotesis sebelumnya. Menurut Mardalis (2014) mengatakan bahwa penelitian eksplanatory bertujuan untuk mengetahui hasil dari adanya kontrol atau manipulasi terhadap variabel-variabel tertentu. Penelitian ini bersifat asosiatif serta menggunakan metode kuantitatif, penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang terstruktur dan dapat mengkuantitatifkan data.

Structural equation modeling (SEM)

SEM atau persamaan struktural merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menganalisis data statistik yang dikembangkan dengan analisis regresi yang digabung dengan analisis faktor dan analisis jalur. Analisis SEM mampu menyelesaikan analisis data secara

bersamaan dengan hanya menginput data kasar (raw data) (Ghozali and LuThan, 2015; Hair, et al., 2017; Wong, 2019). Beberapa perangkat lunak analisis SEM yaitu LISREL dan AMOS. Secara matematis analisis SEM diolah oleh perangkat lunak tersebut berbasis covariance based structural equation modeling (CB-SEM). Menurut Ghozali and LuThan, 2015; Wong, 2019 menyatakan kecocokan model baik pada SEM dilihat pada Goodness of Fit yang terdiri dari:

- 1) Likelihood chi square (χ^2): $P > 0,05$ The ratio of χ^2 degrees of freedom (χ^2/df) $\leq 3,00$
- 2) Comparative fit index (CFI): $\geq 0,90$
- 3) Goodness of fit index (GFI): $\geq 0,90$
- 4) Root mean square of approximation (RMSEA): $\leq 0,08$
- 5) Adjusted goodness of fit index (AGFI): $\geq 0,80$
- 6) Tucker Lewis index (TLI): $\geq 0,90$
- 7) Normed fit index (NFI): $\geq 0,90$
- 8) Parsimonius Normal fit index (PNFI): $0,60-0,90$
- 9) Parsimonious goodness of fit index (PGFI): $0,50-1,00$

Meskipun kadang kala dengan permodelan yang kompleks pada SEM membutuhkan syarat-syarat untuk melakukan analisis yang kadang kala tidak terpenuhi. Sulitnya terpenuhi syarat-syarat untuk analisis menggunakan SEM maka muncullah alternatif dari SEM yaitu partial least square (PLS).

Partial least square (PLS)

PLS merupakan metode analisis statistik multivariat yang dapat melakukan analisis secara bersamaan beberapa variabel bebas dan variabel terikat. Seperti halnya SEM, PLS juga merupakan gabungan antara analisis faktor dan regresi, serta permodelan secara bersamaan, perangkat lunak utama yang digunakan yaitu SmartPLS (Garson, 2016; Ghozali and LuThan, 2015; Hair, et al., 2017; Wong, 2019). Sehingga dengan demikian PLS merupakan salah satu bentuk analisis SEM, oleh karenanya dapat disebut juga sebagai PLS-SEM. Berbeda dengan full SEM, syarat-syarat untuk data dilakukannya analisis PLS SEM lebih longgar. Menurut Ghozali and LuThan, 2015; Hair, et al., 2017 menyatakan beberapa kelebihan PLS SEM dibandingkan full SEM yaitu:

- 1) Dapat digunakan untuk menganalisis permodelan yang kompleks dengan sampel yang relatif kecil
- 2) Dapat digunakan pada analisis sampel besar tetapi dengan landasan teori yang tidak cukup kuat
- 3) Dapat dilakukan analisis tanpa memenuhi syarat uji asumsi statistik

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. Data yang digunakan berupa laporan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir, serta data kepatuhan wajib pajak periode 2017 sampai dengan 2021. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS.

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Berikut merupakan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Malang selama periode penelitian.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017-2021

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Parkir
2017	3.477.454.867	6.279.046.961	7.795.659.768	1.101.425.275
2018	3.752.710.182	7.275.988.356	8.246.729.404	1.081.394.683
2019	4.422.351.425	8.591.754.279	8.839.525.730	1.185.129.894
2020	1.918.316.352	7.821.001.281	5.570.140.377	1.078.336.626
2021	2.096.120.241	9.764.363.676	3.530.223.073	1.311.372.732

Berdasarkan Tabel 1, penerimaan pajak hotel mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat perlambatan sektor pariwisata. Pajak restoran menunjukkan tren meningkat hingga tahun 2021. Pajak hiburan mengalami penurunan pada masa pandemi, sedangkan pajak parkir cenderung stabil.

4.2 Evaluasi Outer Model

Evaluasi outer model dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk penelitian.

Tabel 2. Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Pajak Daerah	0.860
Pendapatan Asli Daerah	1.000
Kepatuhan Wajib Pajak	0.952
Moderasi	1.000

Seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,50 sehingga dinyatakan memenuhi validitas konvergen.

Tabel 3. Nilai Outer Loading

Indikator	Nilai
Pajak Hotel	0.985
Pajak Restoran	0.996
Pajak Hiburan	0.923
Pajak Parkir	0.995

Seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,70 sehingga dinyatakan valid.

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Composite Reliability
Kepatuhan Wajib Pajak	0.948	0.961
Pendapatan Asli Daerah	1.000	1.000
Pajak Daerah	0.212	0.956

Moderasi	1.000	1.000
----------	-------	-------

Nilai Composite Reliability seluruh variabel di atas 0,70 sehingga konstruk dinyatakan reliabel.

4.3 Evaluasi Inner Model

Tabel 5. Nilai R-Square

Variabel Dependen	R-Square	Adjusted Square	R-
Pendapatan Asli Daerah	0.996	0.984	

Nilai R-Square sebesar 0,996 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 99,6%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

4.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan nilai t-statistic dengan taraf signifikansi 5% (1,96) dan p-value < 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Hubungan Variabel	Koefisien	Arah hubungan	Keterangan
Pajak Daerah → PAD	0.146	Positif	Pengaruh positif rendah
Kepatuhan Wajib Pajak → PAD	-0.275	Negatif	Pengaruh Negatif
Moderasi → PAD	1.264	Positif	Pengaruh Positif Kuat

Berdasarkan hasil analisis, variabel pajak daerah memiliki hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah cenderung diikuti peningkatan PAD. Kepatuhan wajib pajak menunjukkan arah hubungan negatif secara langsung dalam model, sedangkan variabel moderasi menunjukkan hubungan positif yang mengindikasikan peran kepatuhan wajib pajak dalam memperkuat hubungan pajak daerah terhadap PAD.

4.5 Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir memiliki hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah cenderung diikuti oleh peningkatan PAD. Dengan demikian, optimalisasi sektor perpajakan daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Pajak hotel dan pajak hiburan memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan sektor pariwisata. Ketika jumlah wisatawan meningkat, tingkat hunian hotel dan aktivitas hiburan cenderung meningkat, sehingga potensi penerimaan pajak daerah juga bertambah. Sebaliknya, pada periode pandemi Covid-19, penurunan mobilitas masyarakat menyebabkan penerimaan dari kedua sektor tersebut mengalami penurunan.

Pajak restoran menunjukkan kontribusi yang relatif stabil selama periode penelitian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor konsumsi masyarakat tetap berjalan dan mampu

menjadi salah satu penopang penerimaan daerah. Pertumbuhan usaha kuliner di Kabupaten Malang juga dapat menjadi faktor yang mendorong peningkatan pajak restoran.

Pajak parkir juga menunjukkan kontribusi terhadap PAD seiring meningkatnya mobilitas kendaraan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Tingginya pergerakan kendaraan di kawasan perdagangan, wisata, dan pusat aktivitas masyarakat membuka peluang peningkatan penerimaan dari sektor parkir.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam hubungan antara pajak daerah dan PAD. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel moderasi mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak, maka potensi penerimaan daerah dapat semakin optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menggambarkan bahwa peningkatan penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir yang didukung oleh kepatuhan wajib pajak berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat pengawasan, pelayanan perpajakan, dan edukasi kepada wajib pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, pajak daerah yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir menunjukkan hubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah cenderung diikuti oleh peningkatan PAD, sehingga pengelolaan pajak daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kemampuan keuangan daerah.

Secara sektoral, pajak restoran menunjukkan kontribusi yang relatif stabil selama periode penelitian, sedangkan pajak hotel dan pajak hiburan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi pariwisata dan mobilitas masyarakat, terutama pada masa pandemi. Pajak parkir juga memiliki potensi kontribusi terhadap PAD seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan penggunaan kendaraan.

Kepatuhan wajib pajak menunjukkan peran penting dalam hubungan antara pajak daerah dan PAD. Tingkat kepatuhan yang baik dalam pelaporan serta pembayaran pajak berpotensi mendorong optimalisasi penerimaan daerah. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan PAD.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir yang didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat menjadi strategi bagi Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang diharapkan terus meningkatkan pengawasan, pelayanan perpajakan, pemanfaatan teknologi, serta edukasi kepada wajib pajak guna mendukung peningkatan penerimaan daerah di masa mendatang.

Referensi

Arya Putra 2022; Drs. Chairil Anwar Pohan 2016; febrianto 2023; fizriyani 2022; mawardi, sjarlis, and saripuddin 2022; Meiani, Supartini, and Eni Maryanti 2022; MUSLICH ANSHORI and SRI ISWATI n.d.; Safitri 2021) Arya Putra, Thaus Sugihilmi. 2022. "Pajak Untuk Pembangunan Nasional." <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html> (January 3, 2023).

- Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si, MBA. 2016. Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. jakarta: pt gramedia pustaka utama.
- Febrianto, vicki. 2023. "Disporapar Kota Malang Harapkan Kunjungan Wisatawan Naik Pada 2023 ." Abdullah Rifai ANTARA . <https://jatim.antaranews.com/berita/671436/disporapar-kota-malang-harapkan-kunjungan-wisatawan-naik-pada-2023> (January 13, 2023).
- Fizriyani, wilda. 2022. "Kota Malang Diharapkan Jadi Pusat Pariwisata Halal Di Indonesia." yusuf assidiq repjogja. <https://repjogja.republika.co.id/berita/r8gz2z399/kota-malang-diharapkan-jadi-pusat-Pariwisata-halal-di-Indonesia> (January 13, 2023).
- Mawardi, gayatri lestari, sylvia sjarlis, and saripuddin. 2022. "PENGARUH PAJAK RESTORAN, PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PEMERINTAH KOTA PAREPARE." Nobel Management Review 3: 287–92. <https://e-jurnal.Nobel.ac.id/index.php/NMaR> (January 3, 2023).
- Meiani, Suratni, Supartini, and Istinganah Eni Maryanti. 2022. "KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH (PAD) KOTA BALIKPAPAN." GANESHWARA 2(2807–5595): 1–17.
- MUSLICH ANSHORI, and SRI ISWATI. METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF. airlangga university press.
- Safitri, Inda Irmanda. 2021. 18 Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. banten.